

PARTISIPASI PEMILIH MELALUI DESA PEDULI PEMILU PADA PEMILIHAN 2024 DI KOTA PALU

Sulfitri Husain^{1*)}, Dandan Haryono¹⁾, Nurhamni¹⁾, Nelpanus¹⁾, Riski Melani¹⁾

Universitas Tadulako¹⁾
Email: dandanharyono@gmail.com^{1*)}

Abstract

This study examines community participation through desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) program. This program was designed by the General Election Commission-Komisis Pemilihan Umum (KPU) which aims to increase people's political participation through DP3. Until now, several problems have been found, both in terms of assessment, program development, implementation and evaluation. The purpose of this study is to analyze the implementation of the DP3 program, public responses, and its impact on participation, especially in the upcoming 2024 elections. A qualitative descriptive method with a case study approach is used to gather information through interviews and analysis of related documents. Through a qualitative approach, this study analyzes program implementation, community response, and its impact on participation in general elections and local elections. The research results show that: Assessment: People face skepticism, political disillusionment, and apathy. Positive aspects: participation and resources. Program Development: Proposed voter education, social campaigns, discussions, guides, meetings. Implementation: Resource and technology constraints, strategy adaptation, collaboration. Evaluation: Through observation, interviews, positive impact on participation and awareness. In conclusion, the effectiveness of the DP3 program in increasing public participation in elections and local elections has not been carried out optimally.

Keywords: Political participation, Elections, DP3

Abstrak

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Program ini dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertujuan agar dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui DP3. Hingga kini, masih ditemukan beberapa permasalahan baik dari sisi penilaian, pengembangan program, implementasi dan evaluasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan program DP3, tanggapan masyarakat, dan dampaknya terhadap partisipasi khususnya dalam pemilu 2024 yang akan datang. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali informasi melalui wawancara dan analisis dokumen terkait. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis implementasi program, respon masyarakat, dan pengaruhnya terhadap partisipasi dalam pemilu dan pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penilaian: Masyarakat hadapi skeptisisme, kekecewaan politik, dan apatis. Aspek positif: partisipasi dan sumber daya. Pengembangan Program: Usulan edukasi pemilih, kampanye sosial, diskusi, panduan, pertemuan. Implementasi: Kendala sumber daya dan teknologi, adaptasi strategi, kolaborasi. Evaluasi: Lewat observasi, wawancara, dampak positif pada partisipasi dan kesadaran. Kesimpulannya efektivitas program DP3 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada belum di laksanakan secara maksimal.

Kata kunci: Partisipasi politik, Pemilu, DP3

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak direncanakan akan berlangsung pada 14 Februari 2024 (Humas Kemensetneg, 2022). Segala bentuk persiapan dilakukan hingga saat ini, termasuk mempersiapkan meningkatnya jumlah partisipasi pemilih dari tahun sebelumnya. Dalam upaya tersebut, Komisi pemilihan umum (KPU) bersama pemerintah daerah membuat suatu program yang bernama Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan atau disingkat menjadi (DP3). Program tersebut merupakan salah satu kegiatan yang menasar masyarakat khususnya yang tinggal daerah rawan bencana seperti daerah Kota Palu, daerah yang memiliki tingkat kecurangan/pelanggaran pemilu, dan daerah-daerah yang partisipasi pemilunya masih rendah (Sulteng.kpu.go.id, 2022).

Di Sulawesi Tengah sendiri DP3 ini telah terbentuk pada 7 (tujuh) desa yakni Parigi Moutong, Kab Tojo Una Una, Banggai (terdapat 3 Desa), Donggala, dan Kota Palu. Program pelaksanaan DP3 bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran pada proses pemilu. Selain itu, dalam programnya berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan pemilih pemula dalam pemilu yang akan berlangsung.

Secara nasional, target partisipasi Pemilu ditetapkan sebanyak 77,5 persen. Di Kota Palu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Presiden dan Legislatif) 2019 mencapai 86,5 persen. Artinya, capaian partisipasi politik di Kota Palu telah melewati target nasional. Namun tidak terjadi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang partisipasi pemilihnya hanya mencapai 65,5 persen (Muhakir, 2019; Redaksi, 2020).

Ada banyak faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi politik dalam pemilu, antara lain disebabkan oleh: kurangnya sosialisasi politik kepada masyarakat, kecenderungan masyarakat untuk melakukan Golput (Golongan putih) atau tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu, sikap pesimis masyarakat karena meragukan kualitas dari bakal calon yang akan dipilih, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan masih terdapat daerah terpencil yang memiliki akses susah dijangkau. Berdasarkan data Badan Pengawas pemilihan Umum Sulawesi Tengah bahwa pemilu 2019 lalu terdeteksi beberapa pelanggaran yang terdiri dari: *money politic* dan pembagian sembako (beras, gula pasir dan minyak goreng)

Pelanggaran yang terjadi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau pun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui program dan strategi dalam pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) khususnya yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi temuan ilmiah. Selain itu, membantu dalam peningkatan partisipasi sehingga dapat mensukseskan pemilihan umum yang akan berlangsung pada 2024 sehingga muncul permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan oleh Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) dalam meningkatkan partisipasi Pemilu 2024 belum maksimal.
2. Strategi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan atau (DP3) dalam meningkatkan partisipasi Pemilu 2024 belum dilaksanakan secara optimal.

kemudian berdasarkan hasil observasi selain masalah di atas terdapat beberapa masalah atau kesenjangan yang dapat diidentifikasi terkait dengan partisipasi pemilih melalui program DP3:

1. Masalah identifikasi masalah dengan melibatkan masyarakat:
Seringkali, masyarakat belum memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Identifikasi masalah melalui partisipasi masyarakat dapat membantu menggambarkan betapa pentingnya pemilu bagi mereka, serta permasalahan dan kendala yang mereka hadapi dalam mengambil bagian dalam proses demokrasi.
2. Kesenjangan alternatif program atau Kegiatan:
Terkadang, masyarakat memiliki wawasan yang beragam mengenai solusi yang tepat untuk permasalahan partisipasi dalam pemilihan. Tahap alternatif program atau kegiatan dapat mengungkapkan perbedaan pandangan dan pemahaman yang mungkin ada di antara masyarakat. Ini bisa mencakup berbagai solusi kreatif dan inovatif yang belum tentu dipertimbangkan oleh pihak berwenang.
3. Implementasi program atau kegiatan yang partisipatif:
Salah satu tantangan utama dalam partisipasi pemilih melalui DP3 adalah memastikan bahwa program-program yang diusulkan dan dipilih oleh masyarakat benar-benar diimplementasikan dengan baik. Tidak jarang masyarakat menghadapi hambatan dalam menjalankan program yang telah mereka pilih, seperti keterbatasan sumber daya atau dukungan dari pihak terkait.
4. Evaluasi Partisipatif:
Tahap evaluasi mencakup evaluasi input, proses, dan hasil. Namun, masyarakat seringkali kurang dilibatkan dalam tahap ini. Mereka mungkin merasa bahwa suara dan pandangan mereka tidak dihiraukan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam evaluasi, potensi perbaikan dan peningkatan dalam program DP3 dapat diidentifikasi lebih baik.

Dalam konteks partisipasi pemilih melalui Desa Peduli Pemilu dan pemilihan, teori tahapan ini dapat membantu mengatasi kurangnya kesadaran, memperluas pandangan alternatif, memastikan implementasi yang sukses, dan memberikan peran aktif dalam evaluasi. Ini akan membantu mewujudkan partisipasi pemilih yang lebih inklusif dan efektif dalam proses pemilihan.

Berdasarkan berbagai masalah yang akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 2024 tersebut sehingga peneliti tertarik menganalisis lebih dalam Partisipasi Pemilih Melalui Desa Peduli Pemilu Pada Pemilihan 2024 Di Kota Palu.

B. KAJIAN PUSTAKA

a. Partisipasi

Selanjutnya penulis menggunakan teori yang relevan sebagai landasan penelitian Menurut Sumarto (dalam Sembodo, 2006) bahwa: “Partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antara *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi.” Sedangkan menurut Made Pidarta dalam (Irene, 2009), “Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.”

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu.

Adisasmita (2006) juga mengatakan bahwa: “Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan, perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesedia dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implemmentasi pembangunan.”

b. Partisipasi Politik

Sebagai negara yang menganut demokrasi partisipasi politik merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari konsep tersebut. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum, mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat sebagai warganegara untuk berpartisipasi dalam politik. Sebaliknya, jika partisipasi politik rendah mengindikasikan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses perpolitikan yang ada.

Istilah “*participation*” merupakan pengertian dari partisipasi yang jika diartikan secara umum merupakan keterlibatan aktif masyarakat terhadap segala bentuk kegiatan. Dalam hal politik, partisipasi merupakan keikutsertaan ataupun aktifitas baik perorangan maupun kelompok dalam kegiatan politik (Wardhani, 2018).

Menurut (Teorell, 2006) “*Political participation involves all the activities that the citizens engage in to influence the decisions and policies made by the government and its officials*” (Partisipasi politik semua kegiatan yang melibatkan warga negara untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan para pejabatnya). selanjutnya, (Resnick & Thurlow, 2015). Memahami partisipasi politik sebagai “*It is concerned with the citizens’ activities aimed at influencing government’s decisions and policies through voting in an election, meeting and consulting with party leaders and government officials and elected representatives, and declaring protests, strikes, and demonstrations against the erring leaders.*” (berkaitan dengan kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dan kebijakan melalui pemungutan suara dalam pemilihan, pertemuan dan konsultasi dengan pimpinan partai dan pejabat pemerintah dan perwakilan terpilih, dan menyatakan protes, pemogokan, dan demonstrasi menentang para pemimpin yang bersalah). (Badaru & Emmanuel Olusola Adu1, 2021)

Dari yang dikemukakan di atas, pemahaman partisipasi politik pada intinya adalah keterlibatan warga negara dalam proses perpolitikan yang berdampak pada kegiatan pemerintahan.

c. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum merupakan bagian dari terealisasinya sistem demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat akan mengambil bagian dari proses dalam mewujudkan kedaulatan rakyat agar dapat memilih pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan kehidupan bangsa. Menurut G.J.Wolhoff, pemilu merupakan mekanisme dalam memilih perwakilan pemerintahan yang didasari atas nama rakyat. Selanjutnya, Ramlan Surbakti memahami pemilu sebagai konsep dalam mendelegasikan kedaulatan rakyat dalam memilih Presiden/wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD, perubahan politik yang berlangsung secara tertib dan periodik, dan sarana untuk membahas persoalan masyarakat secara terbuka dalam forum legislatif dan eksekutif (Jurdi, 2018).

d. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)

<http://jurnaldialektika.com/>

Komisi Pemilihan Umum membuat program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketetapan Nomor: 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021. DP3 adalah salah satu bentuk pendidikan didalam melakukan pemilihan Umum (Pemilu) serta pemilihan kepala daerah yang terdiri dari pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, pemilihan wali Kota/wakil wali kota serta Bupati/Wakil Bupati (KPU, 2021). Tujuan dibentuknya DP3 agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, selain itu agar masyarakat dapat memahai berita hoax (berita bohong) yang sering terjadi di tenagh masyarakat (Saputri, 2022). Pembentukan DP3 berdasarkan daerah yang memiliki empat kriteria yang terdiri dari desa yang partisipasi masyarakatnya rendah dalam pemilu dan pemilihan, desa berpotensi rawan bencana, dan desa yang tingkat kecurangan dan pelanggaran tinggi(Hajiji, 2023).

Selanjutnya oprasional teorinya adalah tahapan partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu Tahap Asesment, Tahap Alternative program atau kegiatan, Tahap Pelaksanaan (Implementasi) program atau kegiatan dan Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil) (Isbandi, 2007). Penjelasannya yaitu:

1. Tahap Assesment Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam melihat permasalahan. Dengan begitu mereka jadi punya paradigma tersendiri.
2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan. Tahapan ini melibatkan masyarakat untuk berpikir mengenai problematika yang mereka hadapi berikut cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.
3. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan. Tahapan ini masyarakat melaksanakan atau implementasi program yang sudah dirancang agar terlaksanakan dengan baik.
4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil) Pada tahapan ini dilakukan pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang berjalan.

Penelitian terdahulu Suharyanto, A. (2014). Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (*Journal of Governance and Political Social UMA*) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat Tionghoa dan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat Tionghoa Dalam Pilkada Kota Binjai Tahun 2010 Di Kelurahan Kampung Tanjung Kecamatan Binjai Kota. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara atau metode yang menggambarkan keadaan atau objek penelitian di lapangan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga Kelurahan Kampung Tanjung Kecamatan Binjai Kota yang beretnis Tionghoa sebanyak 326 KK. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara random sampling yaitu 10% dari populasi. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari 326 KK etnis Tionghoa yaitu 32 KK yang diambil secara acak sederhana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif, kemudian dianalisis dengan table frekuensi. Berdasarkan hasil analisa dari observasi, penyebaran angket dan wawancara kemudian diadakan pembahasan hasil penelitian maka didapat kesimpulan bahwa masyarakat Tionghoa di Kelurahan Kampung Tanjung Kecamatan Binjai Kota telah berpartisipasi dalam Pilkada Kota Binjai Tahun 2010. Dengan demikian jelaslah hasil penelitian ini mendukung hipotesis, yang sekaligus berarti hipotesis dapat diterima.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengkaji Partisipasi masyarakat dalam pemilu, metode penelitian deskriptif kualitatif, serta teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun perbedaannya didasarkan atas lokus dan masalah penelitian,

penggunaan teori, aspek waktu, perbedaan dari sisi analisis data, perbedaan dari hasil dan kesimpulan. Kebaruan ilmiahnya dilihat dari pelaksanaan program DP3 menjelang pemilihan umum 2024. Tujuan dari penelitian Ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi pemilih melalui program Desa Peduli Pemilu pada pemilihan 2024 di Kota Palu.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai partisipasi pemilih melalui Desa Peduli Pemilu (DP3) di Kota Palu dengan menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Observasi: Peneliti mengamati tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan sebelumnya dan perubahan tingkat partisipasi masyarakat menghadapi pemilu 2024, terutama di Kota Palu.
2. Wawancara: dilakukan dengan metode pra-wawancara terlebih dahulu untuk memperoleh informan yang dianggap dapat memberikan data yang akurat berdasarkan kondisi di lapangan. Setelah itu, dilakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan detail permasalahan dan solusi terkait partisipasi pemilih melalui DP3. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive.
3. Dokumentasi: Data sekunder terkait fokus penelitian diperoleh melalui penelusuran data dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, tokoh masyarakat, serta referensi berupa buku, jurnal, arsip, dan dokumentasi lain yang relevan.

Informan penelitian terdiri dari:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
2. Kepala sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu.
3. Kepala sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat.
4. Ketua RT/RW kelurahan Kamonji

Analisis data dilakukan dengan metode pengumpulan data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Program DP3 Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pemilu 2024

Pelaksanaan program DP3 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kota Palu menjelang pemilihan Umum 2024 dapat dilihat pada hasil penelitian yang menggunakan aspek dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Tahap Assessment:

Dalam tahap ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman tentang pandangan masyarakat terkait partisipasi pemilih melalui Desa Peduli Pemilu dan pemilihan (DP3) dan permasalahan yang mereka identifikasi. Beberapa aspek yang dapat digunakan adalah:

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, sebagian masyarakat masih menganggap pentingnya peran mereka dalam pemilihan umum tetapi juga menghadapi rasa skeptisisme dan apatis terkait dengan janji politik yang belum terealisasi dan kualitas kejujuran dalam politik. Meskipun banyak masyarakat menyadari bahwa partisipasi mereka memiliki dampak penting pada pemilihan umum 2024 dan proses demokrasi, ada beberapa faktor yang memengaruhi pandangan mereka:

1. Skeptisisme terhadap Janji Politik:

Beberapa masyarakat menyebutkan bahwa mereka merasa skeptis terhadap janji politik yang

sering kali tidak terpenuhi oleh calon atau pejabat terpilih. Mereka merasa bahwa janji-janji tersebut hanya merupakan strategi untuk memperoleh suara, dan karenanya, mereka merasa kurang termotivasi untuk berpartisipasi.

2. Kekecewaan atas Kualitas Kejujuran Politik:

Masyarakat merasa kecewa dengan praktik-praktik kebohongan atau manipulasi dalam politik. Mereka merasa bahwa masyarakat sering kali diperlakukan sebagai objek manipulasi oleh para politisi, sehingga mengurangi kepercayaan mereka terhadap proses politik.

3. Suara dan aspirasi yang diabaikan:

Keluhan masyarakat yang memiliki hak pilih yang beranggapan partisipasinya dalam pemilihan umum, suara dan aspirasi mereka tidak selalu didengar atau direspons oleh pejabat terpilih. Hal ini membuat mereka merasa bahwa partisipasi mereka tidak memberikan dampak yang signifikan, sehingga kedepannya timbul rasa acuh tak acuh dalam proses pemilihan umum.

4. Rasa Apatis dan Merasa Dibodohi:

Beberapa masyarakat merasa apatis terhadap proses politik karena merasa bahwa pilihan mereka tidak benar-benar memengaruhi perubahan yang mereka harapkan. Mereka merasa sebagai korban dari manipulasi politik dan sering kali merasa diabaikan oleh para elit politik.

Namun, meskipun terdapat rasa skeptisisme dan apatis pada beberapa masyarakat, masih ada pemahaman yang melibatkan pandangan positif tentang pentingnya peran masyarakat dalam pemilihan umum. Beberapa informan menyadari bahwa meskipun tantangan dan kekecewaan ada, partisipasi mereka tetaplah penting untuk mengubah dinamika politik dan mempengaruhi perubahan yang diinginkan.

Maka dari itu, penting untuk terus memperjuangkan transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam politik, serta menjembatani kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam janji politik. Ini akan membantu masyarakat merasakan bahwa partisipasi mereka memiliki dampak yang nyata dan positif dalam proses pemilihan umum.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masyarakat mengemukakan beberapa hambatan atau kendala rasional yang mereka hadapi dalam mengambil bagian dalam pemilihan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kurangnya Informasi yang Akurat:

Masyarakat merasa kesulitan untuk mengambil keputusan yang tepat karena seringkali sulit mendapatkan informasi yang akurat tentang calon-calon dan isu-isu terkait pemilihan. Kurangnya akses terhadap sumber informasi yang dapat dipercaya dapat menjadi hambatan dalam mengambil keputusan yang berbasis informasi.

2. Janji Politik yang Tidak Terealisasi:

Banyak informan merasa kecewa dengan janji-janji politik yang tidak terealisasi oleh para calon atau pejabat terpilih. Mereka khawatir bahwa memberikan suara mereka tidak akan berdampak nyata pada perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

3. Ketidakpercayaan terhadap Sistem Politik:

Masyarakat merasa kurang percaya terhadap sistem politik yang dinilai korup, tidak transparan, dan kurang akuntabel. Ketidakpercayaan ini dapat menjadi hambatan dalam memotivasi mereka untuk terlibat lebih aktif dalam pemilihan.

4. Keterbatasan Sumber Daya:

Beberapa masyarakat merasa terbatas oleh faktor ekonomi, terutama dalam hal biaya transportasi atau waktu luang yang diperlukan untuk mengikuti kampanye atau pertemuan

- politik. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses pemilihan.
5. **Ketidakhahaman tentang Proses Pemilihan:**
Beberapa informan mengaku merasa tidak sepenuhnya memahami proses pemilihan, termasuk tata cara pemilihan dan peran mereka sebagai pemilih. Ketidakhahaman ini dapat menjadi penghalang dalam mengambil bagian secara aktif.
 6. **Takut Terhadap Intimidasi atau Ancaman:**
Beberapa masyarakat merasa takut akan potensi intimidasi atau ancaman terkait dengan partisipasi politik. Terutama dalam lingkungan politik yang kurang stabil, kekhawatiran ini dapat menghalangi mereka untuk terlibat lebih aktif.
 7. **Kurangnya Representasi yang Memadai:**
Beberapa masyarakat merasa bahwa pilihan yang mereka miliki tidak mencerminkan aspirasi mereka dengan benar. Kurangnya kandidat yang mewakili nilai-nilai dan kepentingan mereka dapat membuat mereka merasa kurang termotivasi untuk berpartisipasi.

Pemahaman tentang hambatan tersebut penting untuk merancang program yang dapat mengatasi tantangan dalam partisipasi pemilih. Dengan memahami dan mengatasi hambatan tersebut, masyarakat dapat merasa lebih termotivasi dan percaya bahwa partisipasi mereka memiliki dampak nyata dalam proses pemilihan.

Pandangan mereka tentang sumber daya yang mereka miliki untuk berpartisipasi dalam DP3, masyarakat berpendapat bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup banyak dan melimpah untuk berpartisipasi dalam Desa Peduli Pemilu (DP3), namun, sumber daya ini belum dimaksimalkan sepenuhnya. Beberapa sumber daya yang mereka miliki adalah:

- a. Informan memiliki waktu luang yang dapat mereka alokasikan untuk berpartisipasi dalam program DP3. Namun, beberapa merasa bahwa mereka belum sepenuhnya memanfaatkan waktu luang ini untuk terlibat dalam kegiatan terkait partisipasi pemilih.
- b. Masyarakat memiliki pengetahuan dan keahlian yang dapat mereka gunakan untuk mendukung program DP3. Beberapa di antaranya memiliki keterampilan dalam sosialisasi, penggunaan media sosial, atau bahkan kemampuan berbicara di depan umum.
- c. Adanya jaringan sosial yang dapat mereka manfaatkan untuk memobilisasi dan mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam program DP3. Mereka dapat mengajak keluarga, teman, dan tetangga untuk ikut serta.
- d. Masyarakat yang terlibat dalam berbagai kelompok atau komunitas lokal memiliki akses yang lebih baik untuk menyebarkan informasi dan melibatkan anggota komunitas dalam program DP3. Namun, belum semua komunitas tersebut benar-benar dimanfaatkan.

Pandangan ini mengindikasikan bahwa potensi sumber daya yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk berpartisipasi dalam program DP3. Langkah-langkah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya ini melalui edukasi, mobilisasi, dan pelatihan dapat membantu masyarakat merasa lebih termotivasi dan berkontribusi secara lebih aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui DP3.

2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan:

Dalam tahap ini, hasil wawancara dan penelitian dapat mengidentifikasi alternatif program atau kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sebagai solusi terhadap permasalahan yang diidentifikasi. Antara lain:

- a. Masyarakat mengusulkan penyelenggaraan workshop atau pelatihan pendidikan pemilih. Mereka percaya bahwa dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

pentingnya pemilihan dan proses demokrasi, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Selain itu, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

- b. Kampanye sosialisasi pemilu menjadi usulan yang sering muncul. Masyarakat berpendapat bahwa dengan mengadakan kampanye yang kreatif dan informatif tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih, masyarakat akan lebih terpenggil untuk turut serta dalam pemilihan.
- c. Usulan untuk melakukan diskusi publik atau forum dialog yang melibatkan pemangku kepentingan terkait pemilihan. Dengan berbicara langsung dengan para calon, petugas pemilihan, dan tokoh masyarakat, mereka berharap bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan mempertajam pandangan mereka.
- d. Penggunaan media sosial dan platform online sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Mereka berpendapat bahwa konten yang mudah diakses dan disebarluaskan melalui platform ini dapat menjangkau generasi muda dan masyarakat yang lebih terhubung dengan teknologi.
- e. Program bimbingan pemilih diusulkan untuk membantu warga yang memerlukan panduan lebih lanjut terkait proses pemilihan. Program ini dapat melibatkan sukarelawan atau tokoh masyarakat yang memberikan informasi dan bantuan kepada mereka yang kurang familier dengan tata cara pemilihan.

Dalam hasil penelitian, alternatif program atau kegiatan tersebut mencerminkan keinginan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi melalui pendidikan, komunikasi, interaksi langsung, dan pemanfaatan teknologi. Usulan ini dapat menjadi landasan bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam membangun partisipasi pemilih yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan potensi keberhasilan dan dampak melalui berbagai cara ini, masyarakat berusaha untuk merancang alternatif yang paling tepat guna, efektif, dan sesuai dengan konteks serta kebutuhan mereka. Ini mencerminkan komitmen mereka untuk mencapai partisipasi pemilih tahun 2024 yang lebih kuat dan bermakna melalui DP3.

3. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan:

Pada tahap ini, penelitian dapat menjelaskan sejauh mana masyarakat berhasil mengimplementasikan program atau kegiatan yang telah mereka rancang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan menghadapi tantangan dalam hal pemahaman dan pengambilan keputusan. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami seluruh program DP3. Banyak dari mereka merasa bingung untuk mengimplementasikan peningkatan partisipasi pemilih melalui Desa Peduli Pemilu dan pemilihan (DP3). "Kami mendengar ada program DP3 untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tapi sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Apa pilihan yang tersedia? Kami merasa kurang tahu." (wawancara dengan ketua RT 02, RW 04, tanggal 4 Agustus 2023). Dalam hal ini, fasilitator ataupun penanggung jawab yang turun ke masyarakat harus menjelaskan secara detail maksud dan tujuan DP3, program inipun harus berkelanjutan disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya wawancara dengan Ketua RT 02, RW 05: "Seingat saya KPU Kota Palu memang pernah melaksanakan sosialisasi di RT kami karena memang di RT ini adalah pemilih terbanyak di kelurahan Kamonji yang ada di kota Palu. Adapun bentuk kegiatannya hanya berupa sosialisasi yang diadakan di ketua rumah RT yang sebelumnya pelaksanaan sosialisasinya hanya sekali yang diadakan sekitar tahun 2021." (wawancara tanggal 4 Agustus 2023).

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa edukasi dan komunikasi yang lebih efektif

kepada masyarakat sangat penting. Perlu adanya upaya untuk menjelaskan secara rinci setiap program atau kegiatan yang tersedia, serta memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana masyarakat dapat terlibat. Kesadaran yang terus akan meningkat jika sosialisasi secara berkala diadakan, tidak hanya sekali pada saat mendekati pemilu.

4. Tahap Evaluasi:

Dalam tahap ini, hasil penelitian dapat mewakili bagaimana masyarakat dan pihak terkait mengevaluasi program atau kegiatan yang telah diimplementasikan. Aspek yang relevan termasuk:

- a. Masyarakat mengevaluasi hasil dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan melalui berbagai cara yang mencerminkan pemikiran kritis dan objektif. Mengevaluasi hasil program atau kegiatan melalui observasi langsung terhadap dampak yang terlihat setelah program atau kegiatan selesai dilaksanakan. Mereka mengamati perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, atau partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilihan umum sebagai indikator keberhasilan.
- b. Masyarakat berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan program DP3. Memberikan pandangan terhadap program, serta perubahan yang dirasakan setelah mengikuti pendidikan kepemiluan, mengukur sejauh mana program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Melalui aktivitas di media sosial, masyarakat dapat melihat tanggapan dan interaksi di platform tersebut. Mereka mencari tanda-tanda partisipasi yang lebih aktif atau pengaruh positif yang muncul dalam diskusi online.

Dengan berbagai metode evaluasi ini, masyarakat berusaha untuk mengukur dampak yang telah dicapai oleh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Informasi dari evaluasi ini akan membantu mereka dalam merumuskan tindakan selanjutnya, melakukan penyesuaian, dan meningkatkan program atau kegiatan di masa mendatang.

b. Tantangan dalam mengimplementasikan program DP3

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui Desa Peduli Pemilu (DP3) ada beberapa tantangan sekaligus menjadi hambatan di antaranya adalah:

1. Kesulitan dalam menemukan waktu yang tepat untuk mengadakan edukasi pemilu melalui workshop atau *sharing* pendapat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang lebih mementingkan pekerjaan dari pada terlibat sosialisasi kepemiluan. Terutama di daerah dengan keterbatasan pemahaman dan wawasan.
2. Dalam hal pemanfaatan media sosial dan platform online, masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses teknologi dan internet mungkin merasa terbatas dalam mengimplementasikan program tersebut. Tantangan ini dapat memengaruhi upaya mereka untuk mencapai audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.
3. Pengelolaan teknis pelaksanaan program, seperti bagaimana menyusun dan menyampaikan materi pendidikan, merancang kampanye yang efektif, atau mengatur pertemuan yang berlangsung lancar. Kurangnya keahlian mungkin menjadi hambatan dalam mengimplementasikan program dengan baik.
4. Kesulitan mengubah sikap atau keyakinan yang sudah ada terkait partisipasi pemilih. Mengubah pola pikir dan meyakinkan masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan bisa memerlukan waktu dan usaha yang signifikan.
5. Informasi tentang hasil evaluasi belum secara luas disebarkan kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat merasa tidak memiliki gambaran penuh tentang sejauh mana kontribusi mereka mempengaruhi perencanaan dan keputusan lebih lanjut.

6. Beberapa masyarakat merasa bahwa mereka belum sepenuhnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program-program DP3. Ini bisa membuat mereka merasa bahwa suara mereka belum diperhitungkan dengan serius dalam menentukan arah program.

c. Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilu 2024

Sebagian besar masyarakat melihat dampak positif dari partisipasi melalui Desa Peduli Pemilu pada Pemilihan (DP3) umum yang akan berlangsung pada 2024 nanti. Masyarakat merasa bahwa program yang diusulkan dan dilaksanakan melalui DP3 telah memberikan dampak yang bermanfaat terhadap proses pemilihan umum dan partisipasi pemilih. Beberapa dampak positif yang mereka lihat adalah:

Masyarakat merasa bahwa program-program pendidikan dan sosialisasi dalam DP3 telah membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Mereka lebih memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih serta dampak dari suara mereka.

Salah satu dampak yang paling terlihat adalah peningkatan partisipasi pemilih. Masyarakat merasa lebih termotivasi dan terdorong untuk turut serta dalam pemilihan umum setelah mendapatkan informasi dan edukasi melalui program-program DP3.

Dampak positif lainnya adalah berkurangnya ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat terkait dengan proses pemilihan. Mereka merasa lebih percaya diri dan memiliki panduan yang lebih jelas dalam membuat keputusan saat pemilihan berlangsung.

Masyarakat merasa bahwa program-program yang menggunakan media sosial dan teknologi telah berhasil menjangkau generasi muda yang sebelumnya cenderung kurang berpartisipasi. Generasi muda merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk menyampaikan suara mereka.

Dengan peningkatan partisipasi dan pemahaman pemilih, masyarakat melihat bahwa kualitas pemilihan umum dapat meningkat. Mereka berharap bahwa pemilih yang lebih terinformasi akan membuat keputusan yang lebih bijaksana dan rasional.

Masyarakat merasa bahwa program-program DP3 telah membantu meningkatkan tanggung jawab sipil mereka terhadap proses demokrasi. Mereka merasa lebih memiliki peran dan kontribusi dalam memilih pemimpin yang tepat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, masyarakat melihat bahwa partisipasi melalui DP3 telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap pemilihan umum dan kesadaran politik mereka. Dengan memahami pentingnya peran mereka dalam proses pemilihan, mereka merasa lebih terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

Sejauh ini, strategi program meningkatkan partisipasi pemilih melalui Desa Peduli Pemilu pada pemilihan (DP3) Berikut adalah gambaran umum tentang strategi dalam pelaksanaan program:

1. Adanya dukungan dari ahli atau fasilitator yang kompeten dalam menghadirkan materi yang informatif dan interaktif.
2. Melakukan sosialisasi dengan merancang pesan yang menarik dan relevan agar mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan menjangkau target audiens dengan efektif.
4. Diskusi publik dengan metode partisipasi aktif, fasilitator yang efektif, dan persiapan materi yang baik akan mempengaruhi sejauh mana diskusi tersebut mencapai hasil yang diharapkan.

5. Membuat program online dengan konten menarik perhatian dan interaksi dari partisipan
6. menggandeng sukarelawan atau tokoh masyarakat yang terlibat secara aktif. Dalam beberapa kasus, program ini bisa sangat efektif karena adanya pendampingan dan panduan langsung untuk warga yang membutuhkan.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap Penilaian:

Bahwa masyarakat masih skeptisis terhadap janji politik, kekecewaan terhadap ketidakjujuran politik, merasa tidak didengar, dan apatis. Aspek positif dari partisipasi dan ketersediaan sumber daya juga ditekankan.

2. Tahap Pengembangan Program atau Kegiatan Alternatif:

Program atau kegiatan alternatif yang diusulkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi. Contohnya meliputi lokakarya edukasi pemilih, kampanye media sosial, diskusi publik, platform online, panduan pemilih, dan pertemuan komunitas.

3. Tahap Implementasi:

Implementasi dari program dan kegiatan yang diusulkan. Ini menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, dan keterlibatan masyarakat. Pentingnya beradaptasi dengan strategi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi tantangan juga ditekankan.

4. Tahap Evaluasi:

Evaluasi dari program dan kegiatan yang telah diimplementasikan. Ini menggambarkan bagaimana masyarakat mengevaluasi hasil melalui observasi langsung, wawancara, survei, interaksi online, dan pengumpulan umpan balik. Dampak positif pada kesadaran pemilih, partisipasi, dan tanggung jawab kewarganegaraan dibahas.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Redaksi, Badaru, K. A., & Emmanuel Olusola Adu1. (2021). The Political Awareness and Participation of University Students in post-Apartheid South Africa. *Research in Social Sciences and Technology*. <https://doi.org/10.46303/ressat.2021.22>
- Hajiji, M. (2023). KPU Donggala: Kader DP3 berperan sosialisasikan pentingnya pemilu. *sulteng.antaranews*. <https://sulteng.antaranews.com/berita/255261/kpu-donggala-kader-dp3-berperan-sosialisasikan-pentingnya-pemilu>
- Humas Kemensetneg. (2022). Jadwal Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan, Presiden Pastikan Tak Ada Penundaan. Kementrian Skertari Negara republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/jadwal_pemilu_2024_sudah_ditetapkan_presiden_pastikan_tak_ada_penundaan
- Haryono, D., & Marlina, L. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Stunting Di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *The Indonesian Journal Of Politics And Policy (IJPP)*, 3(2), 42-52.
- Irene, Siti. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (1 ed.). Kencana.
- Sembodo, Heru. 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Malang: Universitas Brawijaya
- KPU. (2021). Mengenal Program Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan. komisi pemilhan umum kota Malang. <http://kpud-malangkota.go.id/berita/mengenal-program-desa-peduli-pemilu-dan-pemilihan>
- Muhakir. (2019, Mei). Pemilu 2019, Partisipasi Pemilih di Kota Palu Capai 86 Persen. *Tribun Timur.com*. <https://makassar.tribunnews.com/2019/05/10/pemilu-2019-partisipasi-pemilih-di-kota-palu-capai-86-persen>
- Redaksi. (2020, Desember). Pandemi Covid-19, Partisipasi Pemilih di Pilkada Palu Hanya 65,5 Persen. *Sulteng Raya*. <https://sultengraya.com/read/103137/pandemi-covid-19-partisipasi-pemilih-di-pilkada-palu-hanya-655-persen/>
- Saputri, E. (2022). Kpu Bangkep Gelar Launching Dan Bimtek Program DP3. Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Sulteng.kpu.go.id. (2022). Mendorong Peningkatan Partisipasi Melalui Program DP3 DI Provinsi Sulawesi Tengah. KPU. <https://sulteng.kpu.go.id/berita/baca/7832/mendorong-peningkatan-partisipasi-melalui-program-dp3-di-provinsi-sulawesi-tengah>
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 151-160.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407.g9060>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (t.t.). <https://peraturan.bpk.go.id>